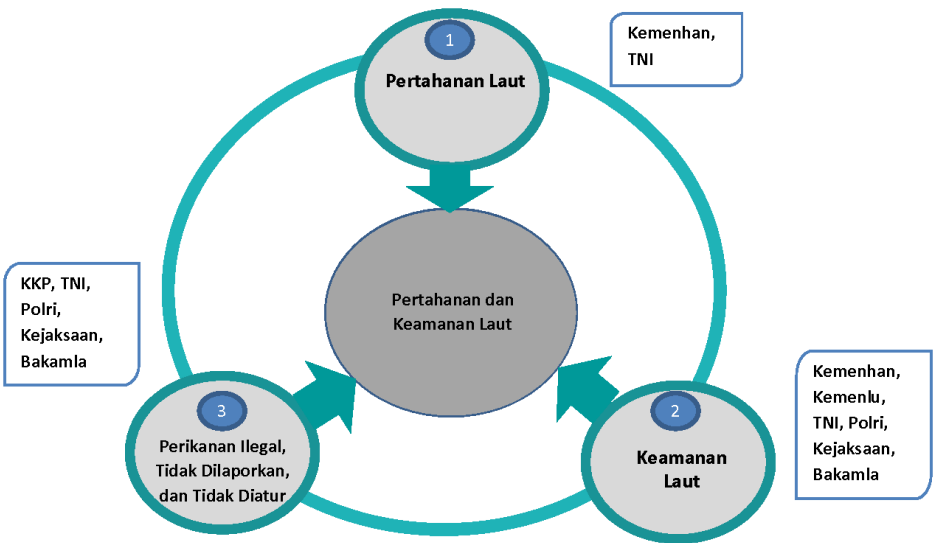


PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

Program prioritas pertahanan dan keamanan laut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pertahanan Laut; (2) Keamanan Laut; dan (3) Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Pertahanan Laut

Posisi geografis dan geopolitis Indonesia yang sangat strategis membentang dari timur Samudera Hindia hingga barat Samudera Pasifik, dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km² atau merupakan 70% dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL), serta berbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga Hal tersebut menjadikan posisi Indonesia sebagai persinggungan berbagai kepentingan pihak/negara lain, sehingga kemampuan pertahanan laut yang kuat menjadi sebuah

kebutuhan untuk menegakkan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman yang muncul.

Berbagai kepentingan yang akan saling bertemu di wilayah laut Indonesia, mengharuskan adanya kekuatan pertahanan laut yang kuat dan efektif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sengketa perbatasan laut dan adanya kapal-kapal asing yang berlayar tanpa memerlukan izin melalui wilayah kedaulatan RI merupakan beberapa tantangan yang harus selalu diperhitungkan. Kemampuan TNI sebagai penjaga kedaulatan perlu didukung dengan alutsista yang memadai sejalan dengan luasnya cakupan wilayah operasi. Pemenuhan *minimum essential force* merupakan program pemerintah untuk modernisasi militer Indonesia sebagai suatu kebutuhan yang penting menuju sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Sistem pertahanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan sistem pertahanan semesta (sishanta) yang terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan/pendukung matra laut dapat berupa kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal sipil, kapal nelayan, dan masyarakat maritim. Untuk itu, kemampuan sistem pertahanan semesta merupakan sebuah keharusan.

2. Keamanan Laut

Keamanan laut yang diharapkan adalah terciptanya kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran hukum. Keamanan laut/maritim menjadi unsur penting pembangunan kemaritiman. Secara garis besar, tantangan dan isu-isu utama dari ancaman keamanan maritim di Indonesia adalah: (1) perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, serta *trans-national crimes*; (2) klaim kedaulatan; (3) pengamanan navigasi laut baik yang melalui ALKI ataupun alur laut lainnya dalam laut wilayah dan laut perairan kepulauan Indonesia; (4) belum optimalnya sumber daya pertahanan laut Indonesia, yang terdiri atas sumber daya manusia, alutsista dan infrastruktur pengawasan, teknologi pertahanan, serta data dan informasi pertahanan. Tantangan lainnya, dibutuhkan sebuah *National Integrated Surveillance System* (NISS) yang mampu mengoptimalkan sumber daya dalam sebuah Sistem Komando Pengambilan

Keputusan. Saat ini, penjagaan terhadap keamanan laut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sistem dan informasi serta sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penindakan, serta belum optimalnya keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam menangani masalah keamanan laut.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan akan terus ada sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itulah dalam konteks keamanan laut/maritim ini dibutuhkan peran TNI yang kuat sebagai penjaga kedaulatan dan mempunyai kemampuan *deterrence effect* terhadap negara lain yang berani mencoba mengusik kedaulatan di wilayah Indonesia.

3. Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) dan Kejahatan Perikanan (*Fisheries Crimes*)

Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah praktek eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan melanggar aturan. Indonesia telah menjadi sasaran praktek *IUU Fishing* sejak lama sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. *IUU Fishing* dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, baik pada perikanan skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.

Selanjutnya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kejahatan yang serius seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan orang dalam mata rantai *IUU Fishing* atau yang disebut sebagai kejahatan perikanan yang memerlukan penanganan terpadu.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas pertahanan dan keamanan laut, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019 PROGRAM PRIORITAS D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT											
Sasaran Utama: Menurunnya pelanggaran di wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
D.1 PERTAHANAN LAUT; D.2 KEAMANAN LAUT; D.3 PERIKANAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING)											
1	Pembangun- an Pertahan- an dan Ke- amanan Laut yang Tang- guh;	Modernisasi alat utama sistem perta- hanan (alut- sista) dan non-alutsista serta pengem- bangan fasili- tas sarana dan prasara- na	Peningkatan dan pengada- an fasilitas sarana dan prasarana	Pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Kepulauan Natuna	-	1 pangkal- an	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
				Pembangunan dermaga	-	10 dermaga	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Pengadaan <i>Landing Helicopter Dock</i> (LHD)	1 paket	-	-	-	-	Kemenhan	TNI	APBN	
		Peningkatan/ pengadaan senjata elek- tronika dan amunisi	Terpenuhinya senjata dan amunisi	Amunisi Kapal Republik Indonesia (KRI)	-	8 jenis (27.274 butir)	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Peningkatan/ pengadaan	Peningkatan kesiapan dan	Jumlah der- maga yang di-	10 dermaga	12 dermaga	10 dermaga	10 dermaga	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		fasilitas dan sarana pasarana matra laut	penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI	bangun dan direhabilitasi							
				Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan sarpras pangkalan TNI	253 paket	253 paket	253 paket	253 paket	TNI		APBN
				Pembangunan dalam rangka mendukung pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)	-	13 paket	13 paket	13 paket	TNI		APBN
				Pembangunan fasilitas dan sarpras Lapangan Udara Angkatan Laut (Lanudal)	-	1 paket	1 paket	1 paket	TNI		APBN
				Jumlah pembangunan fasilitas dan	-	1 paket	-	-	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				sarpras <i>naval cyber command</i> (NCC)							
		Peningkatan/ pengadaan peralatan surta hidro-oceanografi (hidros)	Meningkatnya kemampuan dan penambahan peralatan surta hidros	Jumlah pengadaan peralatan surta hidros dan alat ukur <i>workshop</i> veranautika	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	TNI		APBN
		Peningkatan/ pengadaan Kapal Republik Indonesia (KRI)/alat apung (alpung) dan kendaraan tempur (ranpur)/kendaraan taktis (rantis)	Meningkatnya kemampuan dan kekuatan KRI, Kapal Angkatan Laut (KAL), alpung, ranpur dan rantis	Jumlah pengadaan KRI, KAL, alpung, ranpur dan rantis	157 unit	130 unit	85 unit	85 unit	TNI		APBN
				Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan suku cadang (sucad) KRI, KAL, alpung, ranpur dan rantis	37 paket	48 paket	37 paket	37 paket	TNI		APBN
				Jumlah peng-	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				adaan amuni- si KRI, KAL, alpung, ran- pur dan rantis							
2	Pembangun- an Karakter Bangsa yang Berorientasi Kelautan da- lam Upaya Bela Negara	Pembinaan kesadaran bela negara	Penerapan nilai-nilai ke- sadaran bela negara pada masyarakat	Wilayah yang menerima pembentukan kader bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
				Pedoman penataan dan pembinaan kesadaran bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
				Wilayah yang menerima bimbingan teknis, aktu- alisasi, imple- mentasi, revi- talisasi pembi- naan kesadar- an bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
3	Peningkatan Kemampuan	Penyelengga- raan kepolisi-	Meningkatnya patroli di wila-		-	179.850 kegiatan	-	-	Polri		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	dan Kinerja Pertahanan dan Keamanan secara Terpadu di Seluruh Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, serta di Luar Wilayah Yurisdiksi sesuai Hukum Internasional	an perairan Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut	yah perairan Terselenggara-nya operasi bersama keamanan laut terintegrasi		-	27 operasi	-	-	Bakamla	Kemenhub, KKP, Kemenkum-HAM, Kemenkeu, Polri	APBN
4	Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Laut Baik di Tingkat Regional	Pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional	Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat	Kegiatan kerja sama perta-hanan yang mengacu pada politik bebas aktif dan jati diri sebagai bangsa maritim di forum internasional	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan, Kemenlu	TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	maupun Inter-nasional		Keikutsertaan dalam pasu-kan perdamai-an dunia di berbagai kawa-san sebagai wujud dalam menjaga per-damaian dunia	Kegiatan pe-ngiriman pa-sukan perda-maian dunia sesuai dengan standar yang dipersyarat-kan dalam rangka mewu-judkan keikut-sertaan untuk menjaga per-damaian du-nia	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan, TNI	Kemenlu	APBN
			Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	Kegiatan diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	20% -	20% 1 kegiatan	20% 1 kegiatan	20% 1 kegiatan	Kemenhan, Kemenlu		APBN
5	Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah	Mewujudkan penegakan kedaulatan dan hukum di seluruh wilayah per-	Tergelarnya kekuatan per-tahanan dan keamanan (darat, laut, dan udara)	Persentase gelar kekuat-an darat, laut, dan udara yang sinergis	80%	85%	90%	95%	Kemenhan, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP, Kemenhub,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Yurisdiksi	airan yuris- diksi	yang sinergis dan terintegra- si	dan terintegrasi						Kemenkeu, Kemen-LHK, Kemenkum- HAM, Polri	
			Terwujudnya keamanan di seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional	17%	14%	11%	8%	Kemenhan, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko- polhukam, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemen-LHK, Kemenkum- HAM, Polri	APBN
				Persentase ob- jek vital nasio- nal bersifat strategis yang dinyatakan aman	100%	100%	100%	100%	Polri		APBN
		Penyelengga- raan operasi militer selain perang dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan	Meningkatnya penegakan hu- kum dan pen- jagaan keaman- an di wilayah laut yurisdiksi nasional	Penyelenggara- an Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	-	1 kali	1 kali	1 kali	TNI	Kemenhan	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		wilayah laut yurisdiksi nasional									
		Pemeliharaan dan perawatan pesawat udara	Meningkatnya kesiapan dan keberhasilan pusat penerbang TNI dalam mendukung tugas operasi	Pemeliharaan dan perawatan pesawat udara AL	-	8 unit	8 unit	8 unit	TNI	Kemenhan	APBN
		Peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut		Penyelesaian kasus tindak pidana di laut	15 kasus	45 kasus	15 kasus	15 kasus	Bakamla	Polri	APBN
6	Optimalisasi Sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Komputersisasi, In-	Pemeliharaan/ perawatan peralatan komunikasi dan elektronika (komlek)	Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana komunikasi, persandian, dan perang elektronika	Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi pendirian darat (pendirat)	-	7 set	7 set	7 set	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	telijen, Pengawasan, dan Pengintaian (K-4-IPP)		(pernika)								
			Kesiapan alat komunikasi TNI	Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi	-	99 set	99 set	99 set	TNI		APBN
		Pemeliharaan dan perawatan senjata elektronik	Meningkatkan kesiapan peralatan senjata	Pemeliharaan dan perawatan senjata	-	30 unit	30 unit	30 unit	TNI		APBN
		(senlek) dan amunisi	Kesiapan senjata dan alat elektronik	Pemeliharaan dan perawatan senjata elektronik dan pendirat	-	9 unit	9 unit	9 unit	TNI		APBN
		Pemeliharaan/ perawatan al-pung, kapal angkut, KRI, dan ranpur	Meningkatnya kesiapan KRI dan ranpur	Pemeliharaan dan perawatan kapal pendukung	-	42 unit	42 unit	42 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan kapal patroli	-	30 unit	30 unit	30 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan ranpur	-	378 unit	378 unit	378 unit	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/taktis	marinir							
				Pemeliharaan dan perawatan kapal pemukul	-	45 unit	45 unit	45 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi KRI	-	99 set	99 set	99 set	TNI		APBN
				Pemeliharaan senlek KRI	-	94 unit	94 unit	94 unit	TNI		APBN
		Pemeliharaan non-alutsista integratif	Meningkatkan kualitas pemeliharaan Komando, Kendali Komunikasi, Komputer dan Internet (K-4-I)	Jumlah K-4-I yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	TNI, Bakamla	Kemenhub, KKP, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN)	APBN
7	Pemberantasan Kejahatan Perikanan	Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan infrastruktur pengawasan	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kapal pengawas	4 kapal pengawas tipe A	1 kapal pengawas tipe A	1 kapal pengawas tipe A	1 kapal tipe A (lama), 2 unit kapal tipe A (baru)	KKP	Kemenhan, Kemenhub	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengoperasi-an kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pe-laku usaha ke-lautan dan perikanan ter-hadap keten-tuan peraturan perundang-undangan	150 hari operasi kapal pengawas	144 hari operasi	150 hari operasi	150 hari operasi	150 hari operasi	KKP	TNI, Bakamla, Polri	APBN
		Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksa-naan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Operasi terpa-du untuk pe-nanggulangan <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i> di perairan Indonesia	40 hari operasi	-	40 hari operasi	40 hari operasi	40 hari operasi	KKP	TNI, Bakamla, Polri	APBN
		Penanganan perkara pida-na umum di Kejaksaan Tinggi (Kejati)/ Kejaksaan Ne-	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan	Jumlah perkara tindak pidana umum (termasuk tindak pidana perikanan)	-	116.624 perkara	-	-	Kejaksaan Republik Indonesia	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		geri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Ne-geri (Cabjari)	akuntabel	yang diselesai-kan dalam tahap pra-penuntutan, penuntutan dan tahap eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari							
		Peningkatan operasi ke-amanan dan keselamatan laut		Operasi ber-sama keaman-an laut terin-tegrasi nasio-nal	9 operasi	27 operasi	9 operasi	9 operasi	Bakamla	KKP, TNI, Polri, Kemenkeu, Kemenhub, Kemenkum-HAM	APBN